

Transportasi Umum Untuk Semua

Ulil Albab

January 2025

1 Pendahuluan

Sebelum membaca lebih jauh artikel di bawah ini. Muncul pemikiran reflektif dari penulis, benarkah kita dipaksa untuk menggunakan transportasi pribadi? Sehingga jika tidak ada transportasi pribadi maka aktivitas sehari-hari kita akan lumpuh. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak punya akses terhadap transportasi pribadi?

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai termasuk transportasi umum. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan masalah berupa meningkatnya kemacetan dan polusi yang tiap tahun semakin tinggi. Data dari IQ Air menunjukkan dari 46 kota yang dipantau, kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki Kualitas Udara yang setidaknya hampir memenuhi standar WHO. Hal ini diperparah dengan kondisi di mana Indonesia masih bergantung pada Pembangkit Listrik bertenaga batu bara. Pun halnya kontribusi kendaraan pribadi terhadap kualitas udara juga tidak bisa diabaikan.

Masalah utama saat ini adalah masih minim bahkan tidak adanya sistem transportasi umum yang efisien. Kota-kota Metropolitan selain Jakarta belum memiliki transportasi umum yang memadai baik dari sisi jumlah armada, konektivitas maupun interkoneksi antar moda. Adapun untuk kota dengan tier 2, belum ada upaya serius mengembangkan transportasi umum

bagi warganya.

Akan sangat disayangkan jika kota-kota tersebut harus merasakan macet total terlebih dahulu dan semuanya menjadi terlambat untuk menambangkan transportasi masal. Pengembangan transportasi umum yang efisien dan terintegrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jakarta menjadi salah satu contohnya, transportasi umum seperti Trans-Jakarta dan Kereta Api *Commuterline* berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta mempermudah distribusi barang dan jasa. Sehingga pada ujungnya biaya logistik bisa lebih murah dan mobilitas masyarakat semakin tinggi.

2 Manfaat Transportasi Umum

- Mengurangi Kemacetan

Keberadaan transportasi umum yang layak memungkinkan masyarakat untuk berangsur-angsur beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sehingga lambat laun akan membentuk budaya masyarakat yang modern dan mampu mengurangi volume kendaraan di jalan.

Selain itu waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya akan menjadi efisien. Jika dilihat dari ruang lingkup yang lebih besar, ada penghematan modal atau arus uang yang bisa digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

- Menurunkan Polusi Udara

Transportasi umum punya peran untuk menurunkan polusi udara. Gas buang yang dilepaskan ke udara akan semakin berkurang dengan penggunaan energi yang lebih sedikit. Pada akhirnya kualitas udara secara umum akan menjadi lebih baik. Udara yang bersih dapat mengurangi resiko penyakit pernapasan pada masyarakat. Jika dilihat lebih mendalam jumlah klaim asuransi umum dapat turun karena udara yang sehat.

- **Ekonomi**

Jika ditinjau dari aspek ekonomi keberadaan transportasi umum punya dampak signifikan bagi masyarakat. Penghematan biaya transportasi bagi individu jika dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya bahan bakar, pemeliharaan, parkir, pajak kendaraan dan asuransi. Sebagai contoh upah rata-rata UMR bulanan Jabodetabek sekitar 4-5 juta rupiah. Andaikan cicilan sekitar 30% untuk membeli kendaraan bisa dialokasikan untuk hal lain. Tentunya semakin membantu perputaran dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Sebagai catatan, Bank Dunia menyatakan bahwa pengeluaran maksimal untuk transportasi tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan bulanan.

Hal lain adalah akses yang lebih luas di mana akan lebih banyak orang yang bisa mengakses tempat kerja, pasar dan fasilitas umum lainnya. Secara nilai sosial, adanya transportasi umum bisa mengurangi ketimpangan ekonomi antar masyarakat. Kohesi sosial di antara mereka bisa menjadi lebih rekat karena adanya transportasi umum yang mumpuni.

3 Pengembangan Transportasi Umum

Kondisi kota-kota di Indonesia sebenarnya sudah tidak memiliki waktu lagi untuk memilih antara transportasi pribadi/umum. Sudah harus menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan pembuatan transportasi umum terintegrasi. Kita tidak ingin melihat kondisi di mana pengambil kebijakan memilih langkah yang mudah dan cepat. Umumnya mereka memilih untuk membangun lajur baru untuk jalan dikarenakan pemikiran lama yang menganggap bahwa jalan baru artinya penerimaan daerah baru. Sudah ada contoh kota-kota di Indonesia yang memiliki kemauan untuk melayani masyarakat seperti Jakarta dan Semarang meski dengan menggunakan anggarannya.

Dari sisi kebijakan perlu dibuat mekanisme insentif dan disinsentif untuk beberapa kondisi. Jika masyarakat memilih menggunakan transportasi umum, mereka diberi insentif yang menguntungkan secara langsung. Adapun bagi mereka yang menggunakan transportasi pribadi, bisa dikenakan tarif berlapis sehingga membentuk budaya baru yang memaksa untuk menggunakan transportasi umum.

Pihak pendidik juga bisa memulai memberikan edukasi dan membuat kampanye penggunaan transportasi umum. Edukasi yang dilakukan bertujuan untuk mengubah persepsi publik. Sehingga, pada akhirnya publik memiliki pandangan baru bahwa transportasi umum mempermudah aktivitas harian mereka.

Dari sisi jangkauan transportasi umum harus mampu mengover berbagai wilayah. Pemukiman pun harus dibuat padat dan vertikal ke atas. Sehingga jarak tempuh ke ruang kedua dan ruang ketiga tidak jauh. Pada kesempatan selanjutnya penulis akan membahas pentingnya regulasi harga properti di Indonesia.

4 Simpulan dan Seruan

Kehidupan yang layak merupakan salah satu tujuan negara ini didirikan. Rakyat yang tinggal di negeri ini haruslah mendapat akses penghidupan yang layak. Kita tidak boleh dipaksa untuk memiliki kendaraan pribadi untuk aktivitas harian. Melalui tulisan ini penulis menyerukan pada masyarakat sipil untuk ikut ambil bagian mendukung pengembangan transportasi umum di berbagai wilayah di Indonesia. Kita bisa aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberi rekomendasi kebijakan publik terkait transportasi. Kita tentu menginginkan masyarakat sipil di Indonesia semakin kuat demi mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pengambil kebijakan harus mengakomodasi kepentingan umum di atas kepentingan kelompok/individu termasuk transportasi umum untuk semua.